

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat. Namun, setiap Negara memiliki berbagai cara yang berbeda dalam mengatur perekonomian negaranya yang sesuai dengan kondisi Politik, Sosial dan Budaya. Semakin berkembangnya zaman semakin berkembang pula perekonomian Negara, sehingga muncullah perekonomian islam yang diperuntukan untuk sebuah Negara yang bermayoritaskan penduduk beragama islam.

Menurut salah satu ahli yaitu Chapra, Ekonomi Islam merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang membantu manusia dalam mewujudkan kesejahteraannya melalui alokasi dan distribusi baerbagai sumber daya langka sesuai dengan tujuan yang ditetapkan berdasarkan syariah (al-‘iqtisad al-syariah) tanpa mengekang kebebasan individu secara berlebihan, menciptakan ketidakseimbangan makro ekonomi dan ekologi,

atau melemahnya solidaritas keluarga dan sosial serta ikatan moral yang terjalin di masyarakat.

Sistem Keuangan Islam merupakan bagian dari konsep yang lebih luas tentang Sistem Ekonomi Islam. Keuangan Islam bukan sekedar transaksi komersial, tetapi harus sudah sampai kepada lembaga keuangan untuk dapat mengimbangi tuntutan zaman. Bentuk sistem keuangan atau lembaga keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam adalah terbebas dari unsur riba. Kontrak keuangan yang dapat dikembangkan dan dapat menggantikan sistem riba adalah mekanisme syirkah yaitu : *musyarakah* dan *mudharabah* (bagi hasil).

Negara Indonesia adalah sebuah Negara dimana mayoritas penduduknya beragama islam, hal ini dibuktikan dengan jumlah penduduk beragama muslim sebanyak 87% (www.infojambi.com). Sehingga dalam mengatur berbagai kegiatan perekonomiannya Negara Indonesia menganut 2 prinsip perekonomian yang dimana salah satunya adalah perekonomian islam. Perekonomian Islam di Indonesia saat ini semakin berkembang. Hal ini dapat dilihat dengan munculnya lembaga-lembaga perekonomian yang berazas Islam, seperti Bank Mu'amalat Indonesia (BMI), Bank Syari'ah Mandiri, Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS), Asuransi Takaful, Baitul Mal Wat-Tamwil (BMT) dan lain-lain. Dengan persaingan antar bank yang bertujuan memberi bantuan kepada masyarakat. Semakin berkembangnya zaman, perusahaan membuka peluang usaha seperti koperasi, asuransi, pegadaian yang berbasis syariah.

Perbankan syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam dengan mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Perbankan syariah harus beroperasi berlandaskan moral, etika, dan tanggung jawab sosial atas ketaatan pada perintah Allah dan khalifah. Sebagaimana Dusuki dan Dar (2005: 392) menyatakan bahwa pada perbankan syariah yaitu perbankan yang berlandaskan syariah yang beroperasi dengan landasan moral, etika, dan tanggung jawab sosial dan adanya prinsip atas ketaatan pada perintah Allah dan khalifah.

Koperasi adalah badan hukum yang didirikan orang perseorangan atau badan hukum kopersai, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi, hal ini sesuai dengan pernyataan Undang-Undang No.17 tahun 2012. Dengan adanya pemikiran bahwa pada dasarnya, perkembangan konsep-konsep pemikiran yang berasal dari Negara-negara barat dan Negara-negara berpaham sosialis. Yang mana pengertian koperasi dari Negara-negara barat adalah suatu organisasi swasta yang dibentuk secara sukarela oleh orang-orang yang mengurus kepentingan anggotanya dan menciptakan keuntungan bagi pihak anggota koperasi maupun perusahaan koperasi. Sedangkan koperasi menurut Negara-negara yang berpaham sosialis merupakan suatu koperasi yang

direncanakan dan dikendalikan oleh pemerintah, dan dibentuk dengan tujuan merasionalkan produksi, untuk menunjang perencanaan nasional.

Seiring dengan perkembangan Indonesia muncullah koperasi syariah, dimana sistemnya sesuai dengan tuntunan ajaran agama islam. Koperasi syariah memiliki pengertian yang sama dengan koperasi umum, dimana kegiatan usahanya yang bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai dengan pola bagi hasil (syariah). Riba adalah sesuatu yang sangat di takuti oleh para umat muslim Indonesia, oleh sebab itu umat muslim akan memilih koperasi syariah yang tuntunannya sesuai ajaran islam. Dalam koperasi syariah tidak mengenal kata bunga tetapi menggantinya dengan bagi hasil dimana bagi hasil ini tidak mengakibatkan kerugian antara *shahibul maal* dengan *mudharib*. Selain itu sesuai dengan ajaran Islam dimana dalam Islam dilarang adanya riba. Seperti yang yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat (275) yang terjemahannya sebagai berikut “ *Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari TuhanNya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni*

neraka; mereka kekal didalamnya”. Salah satunya adalah Kanindo Syariah cabang DAU yang menggunakan sistem syariah, yang dimana salah satu produknya adalah *mudharabah*. Walaupun begitu prinsip koperasi syariah ini tetap mengacu kepada PSAK sebagai sebuah standar perhitungan laporan keuangan dalam perusahaan di Indonesia.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan pedoman dalam melakukan praktek akuntansi dimana uraian materi di dalamnya mencakup hampir semua aspek yang berkaitan dengan akuntansi, yang dalam penyusunannya melibatkan sekumpulan orang dengan kemampuan dalam bidang akuntansi yang tergabung dalam suatu lembaga yang dinamakan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Dengan kata lain, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) adalah buku petunjuk bagi pelaku akuntansi yang berisi pedoman tentang segala hal yang ada hubungannya dengan akuntansi.

Pada 1 Januari 2008 telah diberlakukannya PSAK No.105 tentang Pembiayaan *Mudharabah* untuk menggantikan PSAK No. 59. Sehingga setiap perusahaan syariah harus menerapkan PSAK No.105. *Mudharabah* merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola, Antonio (2001). Pembiayaan *Mudharabah* ini mempunyai dua jenis yaitu *Muqayyadah* dan *Muthlaqah*, Wiroso (2011: 326). Selain itu penerapan bagi hasil program syariah yang tercantum pada Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan (PSAK) No.105 yang terlebih

khusus mudharabah untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan penelitian Andarini (2012) tentang Analisis Transaksi Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan PSAK No.105 yang menyimpulkan bahwa Bank Syariah Mandiri tidak sesuai dengan PSAK No.105, itu terbukti dari laporan keuangan yang masih menerapkan PSAK No.59 padahal PSAK No.59 sudah diganti dengan PSAK No.105 pada 1 Januari 2008. Dan pada penelitian Soraya (2011), menemukan ketidaksesuaian Perlakuan Akuntansi pada BMT dalam mengakui dana mudharabah yang disalurkan sebagai pembiayaan mudharabah pada saat penyerahan kas atau aset non kas kepada nasabah diakui sebagai investasi mudharabah.

Munculnya koperasi syariah yang cukup pesat saat ini menarik perhatian peneliti untuk melakukan penelitian di Kanindo Syariah Cabang DAU, dikarenakan pada Kanindo Syariah Cabang DAU memiliki semua jenis pembiayaan syariah terutama pada produk pembiayaan *mudharabah*. Sesuai dengan penjelasan diatas maka peneliti akan meneliti tentang **“Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Pada Kanindo Syariah Cabang DAU”**

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan penjelasan diatas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah “ Bagaimana perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* pada Kanindo Syariah cabang DAU dengan PSAK ? ”

C. Tujuan Penelitian

Untuk menjawab dari rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai kesesuaian perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* pada Kanindo Syariah cabang DAU dengan PSAK 105.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi:

1. Manajemen Kanindo *Syariah* Cabang DAU

Penelitian diharapkan dapat menjadikan informasi lebih bagi Kanindo *Syariah* Cabang DAU agar dapat memberi pengertian pada calon nasabah terutama pada pembiayaan *mudharabah*.

2. Peneliti selanjutnya

Selanjutnya dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya dan bisa mengembangkan lebih lanjut yang belum terungkap pada Kanindo *Syariah*.